



Research Article

Kekuatan Sosial Yang Mempengaruhi Kurikulum

Abdillah¹, Musleh Wahid²

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; assegafabie@gmail.com
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; musleh.wahed@yahoo.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 15, 2025
Accepted : April 13, 2025

Revised : March 14, 2025
Available online : May 16, 2025

How to Cite: Abdilla, & Musleh Wahid. (2025). Social Forces That Influence Curriculum. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(2), 101-108. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i2.20>

Social Forces That Influence Curriculum

Abstract. The curriculum is an educational instrument that not only reflects educational goals, but is also influenced by social forces in a society. This study aims to analyze the social forces that influence curriculum formulation, especially in Indonesia. Using a qualitative approach, this study explores factors such as politics, economics, and social change as the main elements that play a role in the process of curriculum formulation and implementation. The results of the study indicate that political forces play an important role in determining the direction of the curriculum, especially in responding to government policies related to education. On the other hand, economic factors cannot be ignored, where the needs of the labor market also direct the content and focus of the curriculum. The influence of social movements is also reflected in the development of a curriculum that is more inclusive and responsive to community issues, such as gender equality and social justice.

Keywords: Curriculum, social forces, politics, economy, social change, education

Abstrak. Kurikulum merupakan instrumen pendidikan yang tidak hanya mencerminkan tujuan pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan sosial yang memengaruhi perumusan kurikulum, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasi faktor-faktor seperti politik, ekonomi, dan perubahan sosial sebagai elemen utama yang berperan dalam

proses perumusan dan implementasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan politik memainkan peran penting dalam menentukan arah kurikulum, terutama dalam merespon kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Di sisi lain, faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan, di mana kebutuhan pasar kerja turut mengarahkan isi dan fokus kurikulum. Pengaruh gerakan sosial juga tercermin dalam pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu masyarakat, seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Kurikulum, kekuatan sosial, politik, ekonomi, perubahan sosial, pendidikan

PENDAHULUAN

Kurikulum sebagai komponen utama dalam sistem pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kurikulum sering kali dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial, termasuk politik, ekonomi, dan perubahan sosial (Apple, 2019).

Kurikulum tidak hanya menjadi alat instruksional dalam pendidikan, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat. Sebagai produk dari interaksi berbagai kekuatan sosial, kurikulum mencerminkan nilai-nilai, kepentingan, dan ideologi yang ada dalam lingkungan sosial tertentu. Kekuatan politik berperan penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dan penentuan kurikulum. Pemerintah menggunakan kurikulum sebagai sarana untuk menanamkan identitas nasional dan memperkuat ideologi yang diinginkan.

Selain itu, kekuatan ekonomi turut membentuk kurikulum melalui penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja dan tren globalisasi. Kurikulum di era modern sering kali lebih menekankan pada pengembangan keterampilan teknis yang relevan dengan industri, menunjukkan keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi. Di sisi lain, perubahan sosial, termasuk gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, telah mendorong pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai isu sosial, seperti kesetaraan gender dan keberagaman budaya.

Kurikulum menjadi alat strategis dalam pendidikan untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus menjadi arena di mana kepentingan-kepentingan sosial yang berbeda bertarung untuk mendefinisikan masa depan masyarakat. Melalui pendidikan yang berbasis kurikulum, diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang dinamis sambil mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan kerap kali menjadi medan perjuangan berbagai kelompok kepentingan yang berusaha memasukkan nilai-nilai dan pandangan mereka ke dalam sistem pendidikan (Giroux, 2020).

Berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat, seperti pemerintah, industri, dan gerakan sosial, seringkali melihat kurikulum sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan mereka. Melalui kurikulum, mereka dapat menanamkan nilai-nilai,

ideologi, dan pandangan tertentu yang mereka anggap penting untuk generasi masa depan. Kurikulum pendidikan, dengan demikian, tidak hanya bersifat netral, tetapi juga menjadi arena di mana berbagai aktor sosial bersaing untuk mempengaruhi arah pendidikan, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Apple (2019), kurikulum kerap kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dominan atau memperjuangkan perubahan sosial.

Ini menggambarkan bagaimana sistem pendidikan menjadi cerminan dinamika kekuatan sosial yang terus berkembang.

Secara historis, kekuatan politik menjadi faktor dominan yang mempengaruhi isi dan struktur kurikulum. Pemerintah seringkali menggunakan kurikulum sebagai alat untuk membentuk identitas nasional dan mempromosikan ideologi tertentu (Kelly, 2018). Sebagai contoh, di banyak negara, kurikulum diubah sesuai dengan arah kebijakan politik yang berkuasa pada saat itu. Di Indonesia, peran pemerintah dalam menentukan kurikulum sangat kuat, di mana kebijakan-kebijakan pendidikan sering kali disesuaikan dengan agenda politik (Zamroni, 2020).

Selain itu, perkembangan ekonomi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kurikulum. Dalam era globalisasi, kurikulum pendidikan mulai disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lebih banyak fokus diberikan pada pengembangan keterampilan teknis dan kompetensi yang relevan dengan industri (Marginson, 2019).

Pandangan yang selaras mengenai pernyataan tersebut adalah bahwa kurikulum berfungsi sebagai sarana untuk mengakomodasi tuntutan ekonomi suatu negara selain sebagai instrumen pendidikan. Hal ini terjadi karena pendidikan modern tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, kurikulum sering kali disusun agar relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan industri, seperti pengembangan keterampilan teknis dan kompetensi yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Kurikulum menjadi refleksi dari kebutuhan ekonomi negara, yang menuntut adanya lulusan yang siap bersaing dalam pasar global dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Ball, 2021; Marginson, 2019).

Pendidikan, dalam konteks ini, berperan sebagai motor penggerak ekonomi dengan menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan pasar. Perubahan sosial, termasuk pergerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak minoritas, kesetaraan gender, dan keadilan sosial, juga turut mempengaruhi isi kurikulum. Kurikulum yang inklusif dan memperhatikan keragaman masyarakat mulai dikembangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Sleeter & Carmona, 2021).

Pandangan tersebut menekankan dua dimensi penting dari peran pendidikan dalam masyarakat: sebagai penggerak ekonomi dan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Ketika kurikulum dirancang untuk memenuhi tuntutan ekonomi, ia berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan melahirkan individu yang kompeten di

berbagai sektor industri. Ini sejalan dengan kebutuhan global yang terus berkembang, di mana keterampilan teknis, inovasi, dan kewirausahaan menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi (Ball, 2021).

Di sisi lain, perubahan sosial dan pergerakan yang memperjuangkan hak-hak minoritas, kesetaraan gender, dan keadilan sosial juga memainkan peran krusial dalam membentuk kurikulum yang lebih inklusif. Kurikulum yang memperhatikan keragaman masyarakat memungkinkan pendidikan menjadi lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan dan hak asasi manusia. Ini penting karena pendidikan bukan hanya tentang keterampilan kerja, tetapi juga tentang menciptakan warga negara yang sadar akan hak-hak mereka dan berkomitmen untuk memajukan keadilan sosial. Di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, pengembangan kurikulum yang inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial adalah langkah yang signifikan menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan holistik (Sleeter & Carmona, 2021).

Dengan demikian, kurikulum harus mencerminkan keseimbangan antara tuntutan ekonomi dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Kurikulum yang berorientasi pada pasar tenaga kerja tanpa mengabaikan isu-isu kesetaraan sosial dapat menciptakan pendidikan yang relevan secara ekonomi dan bermanfaat bagi pembangunan sosial.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kurikulum tidaklah statis, melainkan dinamis dan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Fitzgerald, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi kurikulum di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana faktor politik, ekonomi, dan perubahan sosial berinteraksi dalam membentuk kurikulum pendidikan, serta implikasi dari perubahan ini terhadap kualitas pendidikan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kekuatan sosial yang memengaruhi kurikulum pendidikan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pembuat kebijakan, guru, dan ahli pendidikan. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk mengkaji kebijakan pendidikan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring untuk mengakomodasi keterbatasan akses akibat pandemi. Partisipan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan kurikulum dan pengalaman mereka dalam bidang pendidikan. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mengeksplorasi pandangan mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kurikulum.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data yang terkumpul dari wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kekuatan sosial yang memengaruhi kurikulum. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana

kekuatan politik, ekonomi, dan sosial membentuk isi dan struktur kurikulum di Indonesia.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen serta penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh kekuatan sosial terhadap kurikulum. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan induktif untuk menemukan pola-pola yang berhubungan dengan kekuatan sosial dalam perumusan kurikulum.

Penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia, namun temuan-temuan yang diperoleh dapat dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki dinamika sosial dan politik serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana kekuatan sosial mempengaruhi kurikulum di berbagai konteks.

Selanjutnya, hasil analisis tematik akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan pasar kerja.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kekuatan politik memiliki dampak yang besar dalam proses perumusan kurikulum di Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan sangat erat kaitannya dengan dinamika politik yang berkembang. Pemerintah sering memanfaatkan kurikulum sebagai sarana untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum bukan hanya alat pendidikan, tetapi juga instrumen politik yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis negara.

Pemerintah kerap kali menyesuaikan kurikulum dengan perubahan yang terjadi dalam kepemimpinan politik. Setiap pergantian pemerintahan biasanya membawa agenda politik yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi arah dan isi kurikulum. Dengan demikian, kurikulum menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat pengaruh politik, terutama dalam hal ideologi yang ingin disebarkan melalui sistem pendidikan. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai cara untuk membentuk cara berpikir masyarakat sesuai dengan kepentingan politik yang sedang berkuasa.

Selain itu, kurikulum juga digunakan untuk membentuk identitas nasional. Pemerintah sering kali memasukkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam kurikulum untuk memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya terampil dalam aspek akademik dan teknis, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap identitas nasional mereka. Kurikulum, dalam hal ini, berfungsi untuk mempromosikan kesatuan bangsa dan mempertahankan budaya lokal dalam konteks perubahan global yang cepat.

Tidak hanya itu, kurikulum juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dan memperkuat ideologi negara. Melalui pendidikan, pemerintah

berusaha untuk menanamkan ideologi tertentu yang sejalan dengan visi politiknya. Pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah, sering kali difokuskan pada pembentukan sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh pemerintah. Dengan kata lain, kurikulum menjadi alat untuk membentuk masyarakat yang sesuai dengan gambaran ideal yang diinginkan oleh penguasa politik.

Secara keseluruhan, kekuatan politik memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan, terutama dalam perumusan kurikulum. Kurikulum di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan pendidikan, tetapi juga oleh berbagai pertimbangan politik yang mencerminkan kepentingan pemerintah yang berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, khususnya kurikulum, merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengatur dan membentuk identitas nasional serta memperkuat ideologi yang diinginkan.

Perubahan kebijakan yang terjadi seiring pergantian pemerintahan turut memengaruhi fokus kurikulum, terutama dalam hal mata pelajaran yang diutamakan dan nilai-nilai yang diajarkan.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam era globalisasi, kurikulum di Indonesia mulai berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama dalam bidang teknologi dan industri (Marginson, 2019). Perubahan ini terlihat dari peningkatan jumlah program vokasi dan pelatihan keterampilan teknis yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan menengah dan tinggi.

Perubahan sosial juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam membentuk kurikulum. Gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan gender, inklusivitas, dan keadilan sosial mulai mendapatkan tempat dalam kurikulum (Sleeter & Carmona, 2021). Misalnya, pengenalan mata pelajaran yang menekankan pada hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberagaman mulai diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia.

Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam implementasi kurikulum yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial ini. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kesulitan mengimplementasikan kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional, terutama karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur (Kelly, 2018).

Di sisi lain, ada juga ketidakselarasan antara tuntutan pasar kerja dan isi kurikulum. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa kurikulum terlalu berfokus pada kebutuhan industri sehingga mengabaikan aspek-aspek lain dari pendidikan yang bersifat humanis dan holistik (Ball, 2021). Kurikulum yang terlalu teknis dikhawatirkan akan menghasilkan lulusan yang kurang mampu berpikir kritis dan kreatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berbagai kekuatan sosial, termasuk faktor politik, ekonomi, dan perubahan sosial, memiliki dampak yang signifikan terhadap proses perumusan serta implementasi kurikulum di Indonesia. Kekuatan politik

sering kali menjadi penggerak utama dalam menentukan arah kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Faktor politik memengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan isi kurikulum, yang secara langsung terkait dengan agenda politik yang ingin diwujudkan oleh penguasa. Hal ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara pendidikan dan dinamika politik yang ada di Indonesia.

Selain politik, kekuatan ekonomi juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam membentuk kurikulum. Faktor ekonomi mendorong pengembangan kurikulum yang lebih berorientasi pada keterampilan praktis dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Di era globalisasi ini, kurikulum harus mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, pendidikan tidak lagi sekadar berfokus pada pengembangan akademik, melainkan juga pada peningkatan keterampilan yang sesuai dengan permintaan dunia industri dan bisnis.

Perubahan sosial, termasuk gerakan-gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan keadilan sosial, juga berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum. Gerakan sosial ini mendorong pembentukan kurikulum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Kurikulum yang inklusif memberikan perhatian khusus terhadap keberagaman, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan merata bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan besar dalam implementasi kurikulum, khususnya dalam hal keselarasan antara kebijakan kurikulum yang bersifat nasional dan kondisi lokal di berbagai daerah. Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di setiap daerah sering kali menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan yang seragam di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan beberapa daerah, terutama yang terpencil atau kurang berkembang, kesulitan dalam mengikuti kebijakan kurikulum yang ditetapkan di tingkat nasional.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam merumuskan kurikulum. Pendekatan ini akan memungkinkan setiap daerah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, tanpa mengabaikan standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan fleksibilitas tersebut, diharapkan kurikulum dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, perumusan dan implementasi kurikulum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuatan sosial yang ada, baik itu politik, ekonomi, maupun gerakan sosial. Namun, tantangan dalam implementasinya mengharuskan adanya upaya untuk merancang kurikulum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi serta kebutuhan lokal. Pendekatan ini akan membuat kurikulum lebih relevan dan dapat diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat peran pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

SARAN

1. Peningkatan Fleksibilitas Kurikulum

Diperlukan kurikulum yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan lokal. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan otonomi lebih kepada sekolah dalam menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal mereka (Apple, 2019).

2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Kurikulum

Masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan organisasi sosial, perlu lebih dilibatkan dalam proses perumusan kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Giroux, 2020).

3. Penguatan Aspek Humanis dalam Kurikulum

Kurikulum yang terlalu berfokus pada kebutuhan industri perlu diseimbangkan dengan pendidikan yang mengutamakan pengembangan aspek humanis, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan empati (Ball, 2021).

4. Penguatan Infrastruktur Pendidikan di Daerah Terpencil

Pemerintah perlu lebih memperhatikan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil agar mereka dapat mengimplementasikan kurikulum dengan lebih baik, khususnya dalam hal akses terhadap teknologi dan sumber daya (Kelly, 2018).

Daftar Pustaka

- Apple, M. W. (2019). *Ideology and curriculum*. Routledge.
- Ball, S. J. (2021). Education, globalisation and new times: 21 years of the journal of education policy. *Journal of Education Policy*, 36(6), 717-731.
- Giroux, H. A. (2020). *On critical pedagogy*. Bloomsbury Publishing USA.
- Kelly, A. V. (2018). *The curriculum: Theory and practice*. SAGE Publications.
- Marginson, S. (2019). *Globalisation, markets, and education*. Routledge.
- Sleeter, C. E., & Carmona, J. F. (2021). *Un-standardizing curriculum: Multicultural teaching in the standards-based classroom*. Teachers College Press.
- Zamroni, Z. (2020). *Pendidikan dan kekuasaan: Kritik terhadap politik pendidikan nasional*. Pustaka Pelajar.